

PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR

Oleh: Mardiana Nurdin*

ABSTRACT: *This article deals two main points, the interpretation and mission of education, and the equality of educational quality as the main agenda of education in the contemporary discourse. This article is expository and argumentative in nature aiming at describing the real issue. Hence, an accurate investigation is needed to get conclusive findings.*

KEYWORDS: *Pemerataan, kualitas hasil belajar*

TIDAK tercapainya standar kompetensi dalam belajar merupakan masalah yang pendidikan yang banyak menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak. Sindiran terhadap kekurangberhasilan pendidikan di Indonesia diungkapkan dengan istilah ‘tamat tetapi tidak lulus’. Maksud ungkapan tersebut menyiratkan makna bahwa walaupun fakta menunjukkan kelulusan 98%-100% di hampir setiap sekolah, yang layak tamat sesungguhnya hanya berkisar pada angka 40%-50%. Artinya, separuh dari tamatan sekolah tidak layak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tradisi (jika layak diistilahi tradisi) ‘yang penting tamat’ di kalangan pebelajar terjadi karena baik guru, pebelajar, orangtua, ataupun pihak manajemen sekolah tampaknya sudah sepakat agar pebelajar dapat naik kelas atau tamat sekolah tanpa mempedulikan mereka memperoleh ilmu di sekolah atau tidak. Kemampuan dan keterampilan pebelajar pada jenjang pendidikan tertentu praktis terabaikan. Artinya, sekolah bukan lagi sebagai wahana pewarisan ilmu, melainkan wahana pemerolehan ijazah.

Masalah ketidakdisiplinan, dekadensi moral, rendahnya kreativitas dan kemandirian yang menggambarkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan masyarakat dari sisi nirakademik tidak lepas dari kritikan. Hal ini tidak terlepas dari keadaan tenaga pengajar, fasilitas pembelajaran, sistem kelas besar, kurikulum, metode pembelajaran, stra-

*Kandidat doktor dalam bidang Ilmu Pendidikan Bahasa pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta ini adalah dosen tetap pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar

tegi belajar siswa, dan faktor-faktor lain yang tidak terkait langsung dengan sistem persekolahan.

Berangkat dari permasalahan di atas, tulisan ini akan memaparkan dua hal pokok, yaitu interpretasi pendidikan dan misinya, dan pemerataan kualitas hasil belajar sebagai agenda pokok pendidikan yang layak diwacanakan pada era kekinian kita. Karena sifat tulisan ini ekspositoris dan argumentatif yang bertujuan memaparkan masalah apa adanya, diperlukan penelitian akurat dan lacak untuk membuktikan kebenarannya.

PENDIDIKAN DAN MISINYA

Interpretasi awam tentang pendidikan praktis jauh berbeda dengan interpretasi para pakar pendidikan. Dalam wacana awam, pendidikan dapat diinterpretasi dalam bentuk sekolah formal dengan segala aktivitasnya. Mereka hanya mengetahui bahwa pendidikan itu 'sekolah dan ijazah'. Para pakar setuju dengan uraian Langeveld yang memandang pendidikan sebagai sebuah sistem yang terdiri atas subsistem masukan, proses, dan luaran. Terlepas dari pandangan awam dan pakar, wacana pendidikan pada akhirnya akan bermuara pada proses belajar mengajar di kelas yang melibatkan pengajar dan pebelajar.

Misi pendidikan adalah pewarisan ilmu dari generasi ke generasi. Outline ilmu yang dimaksud adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, tradisi, dan nilai atau norma. Pewarisan ilmu tersebut telah berlangsung sejak manusia ada dan umumnya diwakili oleh mereka yang memiliki visi ke depan. Visi mereka tentu saja membentuk generasi yang madani dan lebih bertatanan.

AGENDA PENDIDIKAN: PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia menyiratkan berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian sesegera mungkin. Salah satu gambaran rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia tergambar dari Laporan Bank Dunia, *Education in Indonesia: From Crises to Recovery*¹ dalam hal pencapaian skor hasil tes membaca kelas 4 SD di lima Negara ASEAN. Dalam laporan tersebut, Indonesia menempati posisi kunci dengan pencapaian skor 51.7%, sementara Singapore dan Hong Kong masing-masing 74% dan 75.5%.

Menurut Abbas, persoalan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia sejak 1997 adalah menjaga stabilitas angka pedaftar dan menekan tingginya angka putus sekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jika hal ini tidak dapat dielakkan, dapat dipastikan ada tiga isu mendasar yang akan dihadapi dunia pendidikan di Indonesia ke depan,

yaitu: (a) tingkat pedaftar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah akan terus menurun karena bertambahnya jumlah penduduk miskin yang akan menarik anak-anak mereka keluar dari sekolah, (b) keterbatasan dana pendidikan yang dialokasikan pemerintah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan (c) inefisiensi pemerintah yang bermuara pada pemborosan sumber-sumber daya yang semakin langka.²

Tidak dapat disangkal bahwa ketiga persoalan yang dikemukakan Abbas di atas memang terkait dengan krisis global yang ikut mengimbasi dunia pendidikan di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan laporan PBB-Unesco³ bahwa persoalan utama bangsa-bangsa di negara berkembang adalah pemerintah memiliki beban berat mengelola dan membiayai semua sektor pembangunan. Di era ekonomi global, pemerintah cenderung melupakan bahwa untuk memiliki sistem ekonomi yang kuat dan kemampuan mempertahankan pembangunan ekonomi selain modal dan teknologi, kualitas sumberdaya manusia merupakan faktor penentu utama. Namun, dalam praktiknya, pemerintah di negara berkembang umumnya melupakan tugas mempersiapkan SDM yang bermutu karena dimanjakan dengan pinjaman luar negeri, teknologi, dan tenaga ahli asing. Tugas yang seharusnya diemban oleh sistem pendidikan hanya dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan dana yang merupakan sisa *budget* yang tidak terpakai dalam sektor ekonomi. Dengan demikian, pentingnya pendidikan di sebagian besar negara berkembang hanya menjadi bagian retorika pemimpin politik dalam pidato-pidato mereka namun tidak secara serius menangani program pembangunan di bidang pendidikan. Untuk alasan tersebut, tim penilai dari Indonesia yang melaporkan hal ini kepada PBB beranggapan bahwa jika budget sebesar 4% dari GNP tidak dialokasikan untuk pendidikan, maka tujuan pendidikan dalam Deklarasi Pendidikan Dunia (*Education for All*) dan impementasi empat pilar belajar, yaitu: belajar tahu, belajar melakukan, belajar menjadi, dan belajar hidup bersama hanya sebatas retorika belaka.

Persoalan yang terduga di atas tidak diragukan kebenarannya. Hanya saja persoalan tersebut belum bersentuhan langsung dengan persoalan *real* yang terjadi dalam lingkup kelas yang melibatkan guru sebagai pengajar dan pendidik serta murid sebagai pebelajar dan peserta didik. Para pakar pendidikan senantiasa mencurahkan perhatian pada persoalan pendidikan dalam skala yang lebih luas. Persoalan yang berskala kecil tetapi berdampak langsung pada mutu luaran pendidikan cenderung terabaikan. Pihak yang paling memahami permasalahan krusial yang dihadapi pebelajar di kelas sesungguhnya bukanlah para pakar dan teoritis, melainkan para guru dan pebelajar yang bersentuhan langsung dengan

proses pembelajaran di kelas. Hal ini dikemukakan tanpa mengurangi rasa hormat guru dan pebelajar terhadap para pakar pendidikan yang telah menyumbangkan pemikiran-pemikiran mereka untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.

Dengan demikian, persoalan pendidikan yang seharusnya diangkat sebagai agenda pendidikan di tingkat lokal maupun nasional adalah persoalan yang dihadapi langsung oleh guru dan pebelajar di kelas. Untuk mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi dalam lingkup kelas, diperlukan serangkaian penelitian lacak yang dilakukan sendiri oleh para pengajar.

Sekaitan dengan hal tersebut, sebuah kajian ilmiah telah dilakukan oleh seorang guru SMP untuk penyelesaian akhir program master di Australia. Dalam penelitian tersebut berhasil ditemukan hambatan-hambatan dalam keberhasilan belajar bahasa Inggris pebelajar-pebelajar SMP di kawasan timur Indonesia. Ternyata, akar persoalan dari semua persoalan yang terjadi di dalam kelas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah sistem kelas besar.⁴ Hal ini juga dapat diberlakukan bagi hampir semua jenis mata pelajaran yang disajikan di sekolah formal.

Sistem kelas besar yang diterapkan di sekolah formal perlu dikaji ulang. Dalam kebijakan sistem persekolahan, setiap pebelajar berhak menempati spasi 1 x 1 meter di dalam kelas. Maksimum pebelajar di ruang kelas yang berukuran 24m² hanya 20 orang. Yang terjadi, kelas sesak dengan penumpukan hingga 40 pebelajar. Setting seperti ini jelas merugikan pebelajar karena terbatasnya ruang gerak dan sekaligus menyulitkan guru mengoptimalkan pembelajarannya. Dalam laporan Tim Penilai Nasional untuk pendidikan Indonesia kepada badan Unesco⁵ lebih gamblang disimpulkan bahwa praktik pendidikan di negara-negara berkembang tidak lebih dari sekadar transfer informasi dengan cara yang sangat tradisional dan konvensional dalam konteks masyarakat yang masih dikontrol oleh sistem nilai tradisional. Tim ini meyakini bahwa jika tidak digagas secara profesional dalam bentuk sosialisasi, maka pendidikan tidak akan pernah menjalankan misinya mengimplementasikan empat pilar belajar (belajar tahu, belajar melakukan, belajar menjadi, dan belajar hidup bersama) dan juga tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dasar belajar masyarakat seperti yang dicanangkan dalam Deklarasi Pendidikan Dunia "Pendidikan untuk Semua" yang diproklamkan pada bulan Maret 1990 dari Jomtien, Thailand.

Penerapan kurikulum berbasis kompetensi atau yang lebih dikenal dengan istilah KBK juga menuntut kelas kecil dengan adanya sistem penilaian individual. Implementasi kurikulum ini kembali akan tersendat

jika pembenahan kelas besar tidak segera dilakukan. Perubahan kurikulum diharapkan tidak hanya sebatas retorika atau berganti kulit semata, tetapi lebih kepada perombakan sistem yang dikehendaki oleh kurikulum itu sendiri.

Untuk kelas besar, guru tidak memiliki banyak pilihan metode yang tepat, kecuali metode ceramah. Metode lainnya dapat saja diterapkan, namun banyak hal yang harus dikorbankan. Antara lain, perlakuan individu yang berlatar belakang beragam harus dibiarkan yang bermuara pada tidak meratanya kualitas hasil belajar. Dipahami bahwa mengajar dengan metode ceramah apalagi untuk penerapan keterampilan berbahasa dan semacamnya, sangat tidak dianjurkan. Pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa Asing misalnya, akan sangat sulit jika kelas diisi lebih dari 15 pebelajar. Apalagi hingga 50 pebelajar. Kegaduhan sudah pasti tidak dapat dihindari. Dapat dibayangkan betapa ruwetnya melatih keterampilan berbicara 40 pebelajar secara bergantian. Berapa banyak waktu yang harus dialokasikan? Mata pelajaran lainnya besar kemungkinan mengalami hal yang sama sehingga efektivitas belajar akan sulit dipenuhi.

Implikasi persoalan kelas besar sangat jelas menunjukkan bahwa *stakeholders* pendidikan di Indonesia enggan bercermin pada lembaga pendidikan nonformal. Contoh kasus, mengapa pendidikan model kursus lebih banyak diminati masyarakat meskipun dengan biaya yang relatif lebih mahal daripada sekolah formal? Lembaga kursus yang menawarkan rentang waktu yang relatif singkat mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret. Mutu luarannya umumnya dapat dipertanggungjawabkan dan mampu memenuhi kebutuhan SDM masyarakat. Bagaimana hal itu terjadi? Jawabnya sangat sederhana. Lembaga kursus menerapkan sistem kelas kecil yang membuka peluang bagi guru untuk lebih leluasa dalam merencanakan dan melaksanakan strategi pembelajaran yang beragam. Siswa lebih terfokus pada satu mata ajaran tertentu dan intensitas belajar atau tingkat keseringan belajar turut memberi pengaruh pada mutu luaran. Karena kelas yang relatif kecil dan ideal itulah maka pemerataan kualitas hasil belajar dapat direalisasikan.

Waktu belajar dengan durasi 90 menit per tatap muka di sekolah formal memang sudah cukup. Tetapi, waktu sebanyak itu hanya cukup untuk menghindari kejenuhan dan hanya cukup untuk maksimum 15 pebelajar. Untuk 40 pebelajar, setidaknya dibutuhkan 240 menit per tatap muka atau sekitar 4 jam untuk pembelajaran individual. Namun, waktu sebanyak itu akan sangat riskan. Pembelajaran akan sangat membosankan dan melelahkan. Pebelajar yang memiliki daya tangkap di atas rata-rata akan merasa bosan dan tergerak melakukan aktivitas lain sedangkan pe-

belajar dengan daya tangkap lemah boleh jadi diuntungkan dengan keadaan ini. Persoalannya, di antara siswa tersebut, yang manakah yang akan diprioritaskan? Akibatnya, sekali lagi, pemerataan kualitas belajar dan hasil belajar tidak dapat dipenuhi. Jadi, masyarakat dan pemerintah tidak perlu heran jika setamat sekolah mereka belum mampu menunjukkan kompetensi yang seharusnya.

Sekelumit persoalan yang dipaparkan pada tulisan ini tidak lagi berujung pada pemerataan kesempatan belajar yang selalu didengungkan oleh pemerhati pendidikan, tetapi lebih merujuk kepada pemerataan kualitas hasil belajar. Hal inilah yang mungkin layak diwacanakan dalam agenda pendidikan sekarang ini. Dalam beberapa kesempatan, H.M. Yusuf Kalla yang ketika itu menjabat MENKOKESRA menyatakan bahwa standar kelulusan siswa di tingkat SMP akan ditingkatkan menjadi 6.01. Jika banyak siswa yang tidak mampu mencapai standar tersebut, maka empati perlu dikesampingkan. Kalla mengistilahi dengan 'kita harus tegaan' (baca: hilangkan rasa kasihan).

Namun, yang terjadi ketika standar tersebut perlahan diterapkan mulai dengan 4.01, terjadi kasus-kasus yang dilakukan oknum guru dan pihak sekolah yang 'menguntungkan' pendongkrakan nilai lulus siswa namun merugikan mutu lulusan. Jenis-jenis pelanggaran yang terjadi akibat penetapan standar tersebut antara lain, pemberian kunci jawaban dari pengawas ke siswa di ruang ujian, pengubahan jawaban yang dilakukan di ruang pengawas pasca ujian, dan permintaan sekolah secara institusional meluluskan semua siswa dalam ujian praktik dengan alasan desakan dari orang tua dan Pemerintah Kota, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Pihak sekolah merasa khawatir jika jumlah lulusan menurun karena masyarakat enggan mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah yang jumlah lulusannya minim.

Temuan guru dalam wacana kontemporer pendidikan di Indonesia lebih menitikberatkan pada tuntutan dan keinginan masyarakat terhadap sejumlah perubahan yang konkret, bukan yang ideal. Hal ini tidak sulit dilakukan jika pemerintah, sekolah, dan masyarakat sebagai *stakeholders* pendidikan memiliki komitmen dan visi yang sama dalam melakukan perubahan. Salah satu bentuk perubahan yang ditawarkan adalah dengan membatasi volume pebelajar dalam satu ruang kelas hingga maksimum 20 orang.⁶

Jumlah pebelajar 20 orang per kelas pada awalnya akan terkesan mengurangi kesempatan belajar separuh dari daya tampung kelas-kelas konvensional yang ada sekarang ini. Namun, perlu disadari bahwa untuk menghasilkan luaran pendidikan yang dapat memenuhi standar kebutuh-

an pemerintah dan masyarakat, perhatian harus lebih ditujukan kepada peningkatan kualitas hasil belajar. Hal ini tentu saja harus diimbangi dengan pemberdayaan sekolah-sekolah swasta sehingga pada akhirnya tidak akan ada lagi dikotomi sekolah negeri dan swasta. Yang ada hanya sekolah dengan sejumlah tawaran mutu yang dapat dipertanggungjawabkan melalui *life skills* pebelajar dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan pembatasan daya tampung, peningkatan kualitas tenaga pengajar juga perlu mendapat perhatian lebih. Pelatihan (workshop) dan penataran untuk peningkatan mutu guru memang telah banyak dilakukan. Pembelajaran guru ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi juga telah dibuka seluas-luasnya, bahkan dibelajarkan hingga ke luar negeri. Meskipun demikian, mutu luaran pendidikan formal masih saja dipertanyakan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk merealisasikan rancangan perubahan sistem seperti diuraikan di atas, diperlukan dana yang tidak sedikit dan kerja keras dari semua pihak yang terkait. Satu hal yang perlu disadari bahwa bekerja keras untuk suatu perubahan yang konkret lebih bermanfaat daripada membiarkan keadaan menjadi bertambah buruk.

TERMS OF REFERENCE (TOR):

Pendidikan formal (persekolahan) yang diklaim sebagai lembaga pewarisan ilmu dituntut kemampuannya menunjukkan perubahan yang nyata. Perubahan yang dimaksud adalah kemampuan luaran hasil belajar berperan aktif pada institusi kemasyarakatan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Persoalan yang mendasar yang terjadi adalah banyaknya luaran hasil pendidikan formal yang tidak memiliki kompetensi. Pengalaman mengajarkan kita bahwa di kelas-kelas sekolah formal umumnya hanya ada empat atau lima orang yang biasanya berhasil dengan nilai yang memenuhi persyaratan untuk dianggap kompeten. Selebihnya yang jauh lebih banyak biasanya hanya berada pada posisi rata-rata atau bahkan di bawah standar.

Persoalan ini disinyalir terjadi karena sistem kelas besar yang diterapkan lembaga persekolahan hingga saat ini. Alasannya, agar sekolah menampung anak-anak wajib belajar semaksimal mungkin. Dengan demikian, pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan sesuai ketentuan undang-undang dapat dipenuhi. Sayangnya, teori didaktik metodik pembelajaran serta hasil-hasil penelitian para akademisi terabaikan dan tersia-siakan. Di samping itu, terdapat dikotomi sekolah negeri dan sekolah swasta yang berakibat pada tidak populernya sekolah-sekolah yang dikelola pihak swasta, kecuali yang memang dikelola dengan sangat profesional.

Seorang guru yang sangat cerdas dan profesional sekalipun akan

sangat sulit berbuat yang terbaik di kelas-kelas besar. Metode pembelajaran yang terbatas dan alokasi waktu, ketidaknyamanan belajar, dan berbagai masalah lainnya akan sangat rentan terhadap kegagalan pencapaian tujuan pembelajaran. Siswa yang cemerlang dengan persentasi yang sangat minim mungkin tidak terlalu terganggu dengan sistem pengkelasan model konvensional. Namun, bagaimana dengan siswa yang berdaya tangkap lemah? Sudah dapat dipastikan bahwa mereka cenderung terabaikan. Lantas, bagaimana dengan nasib mereka ke depan? Prinsip ekualitas dalam pemerataan kualitas hasil belajar layak dipertanyakan.

Reaksi cepat dalam menangani hal ini sangat diperlukan. Semua pihak yang merasa sebagai *stakeholders* pendidikan harus segera bertindak menyelesaikan persoalan ini. Waktu tidak dapat dihentikan. Jika bangsa ini serius ingin keluar dari krisis multidimensional, pendidikan harus mendapat prioritas utama dalam hal pembenahan. Salah satu jalan keluar yang ditawarkan adalah perubahan sistem kelas besar menjadi kelas-kelas kecil yang memungkinkan perwujudan pemerataan kualitas hasil belajar.

PENUTUP

Kritik tajam yang ditujukan masyarakat terhadap dunia pendidikan (baca: persekolahan) dewasa ini harus segera disikapi dengan aksi perubahan yang konkret. Perubahan harus segera dilakukan pada level aplikasi dan bukan sebatas wacana konversasi. Masyarakat tidak menilai mutu luaran pendidikan orang perorang, tetapi berdasarkan persentase mutu luaran yang dihasilkan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, tawaran perubahan sistem kelas besar menjadi kelas-kelas kecil perlu segera ditindaklanjuti agar pemerataan kualitas hasil belajar dapat segera diwujudkan. Jika hal ini sudah terealisasi, agenda pendidikan selanjutnya yang sarat dengan persoalan akan mudah diurai dan diselesaikan satu demi satu. Jika tidak, wacana mutu luaran pendidikan akan tetap sebatas wacana. Kata kunci, masyarakat menginginkan perubahan yang kasat mata.

CATATAN AKHIR

1. World Bank, "Education in Indonesia; From Crises to Recovery", *A Report* Washington: World Bank, 1998.
2. Hafid Abbas, *Community-Based Education: A Roadmap of Indonesian Education from Crises to Recovery*, Jakarta: Teraju, 2003. h. 6.
3. Indonesian National Assessment Team, "Education for All: The Year 2000 Assessment Ministry of Education and Culture 1999 of Indonesia", *Country Reports*, New York: Unesco, The United Nation Organisation, 1999, h. 67.

4. Nur Laely Basir, "Barriers to Successful EFL Learning in Eastern Indonesian Junior High School", *A Thesis*, Clayton: Monash University, 2003, h. 104.
5. Indonesian National Assessment Team. *op. cit.*, h. 70.
6. Nur Laely Basir, *op. cit.*, h. 107.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hafid, *Community-Based Education: A Roadmap of Indonesian Education from Crises to Recovery*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Basir, Nur Laely, "Barriers to Successful EFL Learning in Eastern Indonesian Junior High School", *A Thesis*, Clayton: Monash University, 2003.
- <http://www2.unesco.org/wef/countryreports/indonesia/contents.html>, diakses 12/9/2004.
- Indonesian National Assessment Team, "Education for All: The Year 2000 Assessment Ministry of Education and Culture 1999 of Indonesia", *Country Reports*, New York: Unesco, The United Nation Organisation, 1999.
- World Bank, "Education in Indonesia; From Crises to Recovery", *A Report* Washington: World Bank, 1998.